



Asrul Sani: Cuma Pekan Basa Basi

Persatuan Sutradara Malaysia yang menghasilkan suatu kesepakatan bersama.

Ketidakjelasan forum ini, kata Asrul, sudah terlihat dalam pertemuan itu sendiri, peran orang film hanya sedikit dan justru peran pemerintah yang besar. Padahal, pemerintah tidak mempunyai akses langsung ke industri film. Ketidakjelasan ini juga tampak dari publisitas yang sangat kurang dari kegiatan seperti ini. Demikian pula dengan manfaat yang dapat ditarik oleh masyarakat Yogyakarta dari peristiwa semacam ini. "Padahal saluran untuk menyebarkan promosi itu 'kan banyak sekali,'" ujarnya.

Menurutnya, kalau mau bekerja sama ada hal-hal yang langsung secara nyata dapat dilakukan. Selama ini usaha yang sungguh-sungguh tidak pernah ada. "Kita tidak pernah sungguh-sungguh untuk membuat suatu yang nyata," katanya. "Tanpa ada political will."

Salah satu pertanyaan yang mengganggu Asrul adalah mengapa tidak menjadikan forum seperti ini sebagai lembaga tetap untuk hasil yang lebih. Padahal, di satu sisi, masalah dana yang berasal dari hibah pemerintah Jepang melalui *Asian Cultural Foundation* sudah tidak menjadi persoalan lagi. "Buatlah *Asian Documentary Film* tentang masing-masing negara tiap tahun secara bergiliran," saran Asrul. "Ini lebih bermakna."

Selama ini, kata Asrul, kita sangat miskin pengetahuan tentang sesama negara ASEAN. Masyarakat kita lebih banyak tahu bangsa lain dibandingkan dengan negara tetangga. "Dengan langkah ini pu-

la sebenarnya persoalan film Indonesia, juga ASEAN, akan dapat diatasi."

Asrul juga menyebut tidak adanya kemanan yang sungguh-sungguh dari para insan film kita untuk mengembangkan perfilman nasional. Selama ini orang memang ramai membicarakan kelesuan film nasional. Mereka menyebut hal itu terjadi karena serbuan film asing dan booming televisi. Namun, Asrul Sani tidak berpendapat demikian.

Kelesuan film nasional, menurut Asrul, tak lain karena kegamangan yang dialami oleh pekerja film. Penyebab lain, adalah kurangnya penulis naskah, sutradara, pengembang, "situasi baru" karena efek tif dan kemampuan teknis yang jauh dari memadai.

Dalam hal ini Asrul yakin besar bahwa kebebasan untuk mengeluarkan pendapat selalu mempunyai pengaruh yang positif bagi kehidupan kreatif dunia film. Dicontohkannya kondisi perfilman Thailand. Pada *Asian Film Festival 1972*, film Thailand sama sekali tidak diperhitungkan. Namun, ketika ada perubahan kehidupan politik di negeri gajah itu, film Thailand mengalami kemajuan yang sangat pesat. "Film-film mereka dan temanya berubah, dan kini sudah bisa dilihat mutunya," katanya.

Di Indonesia, lanjutnya, yang terjadi adalah kegamangan. Ini semua tak lepas dari banyaknya hal yang ditubuhkan dalam masyarakat kita. Ada banyak butasan yang tidak boleh disentuh. Akibat yang lebih jauh, pekerja film banyak menghindar-

kan diri dengan menulis kejadian di "negeri antah berantah".

"Pejabat dan fungsionaris lembaga pemerintah di sini tidak boleh disentuh," kata Asrul. "Padahal film adalah cermin masyarakat, dan masyarakat Indonesia harus melihat wajahnya dalam film-filmnya."

Salah satu fungsi film, menurut Asrul, adalah kedekatan dengan penonton. Oleh karena itu, Asrul sama sekali tidak setuju bila dikatakan film pemenang festival selalu kurang berhasil di pasaran. Bukti nyata, kata Asrul, adalah film *Taksi I*. Salah satu keberhasilan film tersebut adalah kedekatannya dengan penonton. Kondisi yang dipotret dalam film tersebut adalah kondisi sebenarnya dari masyarakat, suasana kampung yang tanpa dipoles sama sekali. "Karena, kita suka melihat wajah kita sendiri bagaimanapun keadaannya."

Film-film Indonesia, menurut Asrul, juga tertinggal jauh dalam penguasaan teknis. Ini, katanya, memang bukan masalah mendasar, karena bisa dipelajari. Namun, ironisnya, kita sudah mempunyai sarana multi media yang canggih, seperti MMTC di Yogyakarta. "Kita tidak menghasilkan apa-apa karena teknis *rekayasa* orangnya tidak tepat dan tidak obyektif," katanya.

Itu semua, menurut Asrul, tidak ada kaitannya dengan kebijakan pemerintah. Sebab, teknik pelaksanaannya berdasarkan sifat dan fitrah kerja. Oleh karena itu, saran Asrul sederhana saja, "beri kesempatan bagi yang memang mampu!"

■ Indah Wulandari

Pekan Film ASEAN, menurut Asrul Sani, masih sekedar menjadi ajang basa-basi bagi para insan film. Pekan film yang baru saja berlangsung di Yogyakarta 5-9 April 1997 itu, katanya, memang menjadi forum pertemuan insan film ASEAN, tapi masih diperlakukan sebagai pelengkap dan formalitas.

"Ada pertemuan ekonomi dan perdagangan, kenapa enggak dengan filmnya? Ya sekalian saja dibikin pertemuan insan film," kata Asrul Sani. "Oleh karena itu, apa yang dihasilkan dari forum ini tidak pernah jelas."

"Kita tidak perlu mengharap apa-apa dari forum seperti ini. Forum yang diperlakukan sebagai tempelan, tidak akan bisa berbuat apa-apa," lanjut penulis skenario handal ini. "Ini hanyalah basa-basi yang memerlukan uang," tabahnya.

Tanpa forum seperti ini, kata Asrul Sani, kerja sama antarinsan film ASEAN sudah berjalan. Misalnya, dengan pembahasan antar organisasi, yakni KFT dan